



H. ASHARI TAMBUNAN

Bupati Deli Serdang

H. M. A. YUSUF SIREGAR

Wakil Bupati Deli Serdang



Drs. H. MISRAN SIHALOHO, M.Si

Kadis Dukcapil Kab. Deli Serdang



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Peraturan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024

Bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

b. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan Bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif maupun kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

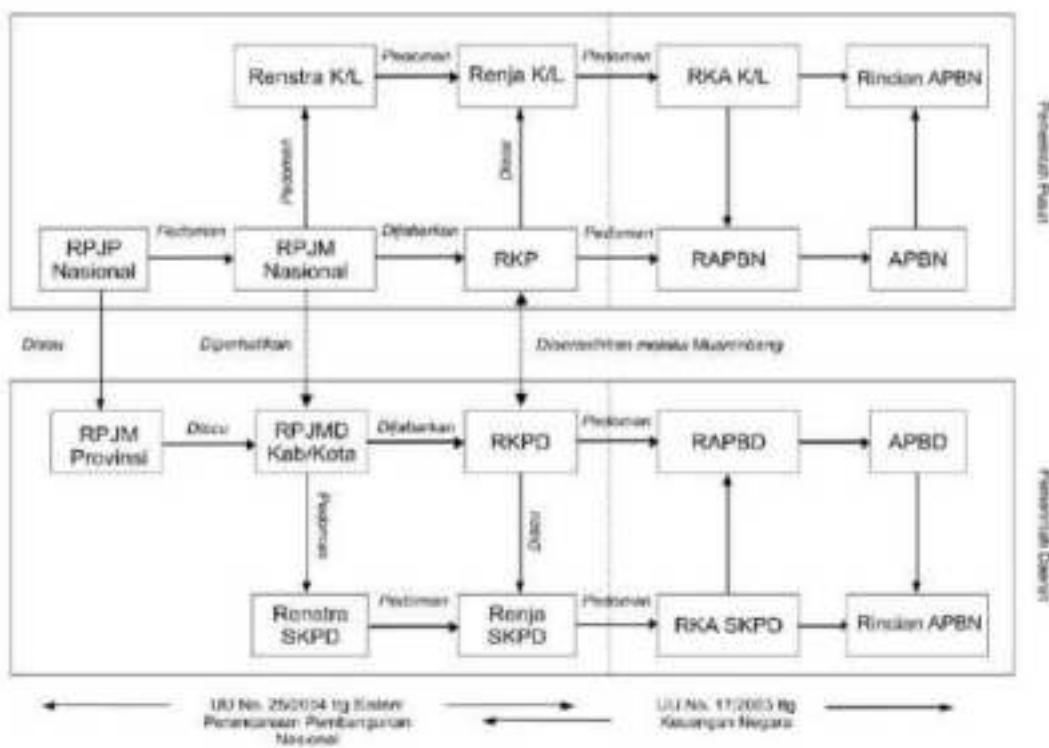
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Persiapan Penyusunan;
- b) Penyusunan Rancangan Awal;
- c) Penyusunan Rancangan;
- d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e) Perumusan Rancangan Akhir dan;
- f) Penetapan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan reviu hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara dokumen Perencanaan dan Penganggaran



B. Landasan Hukum

- Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Perangkat Daerah

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

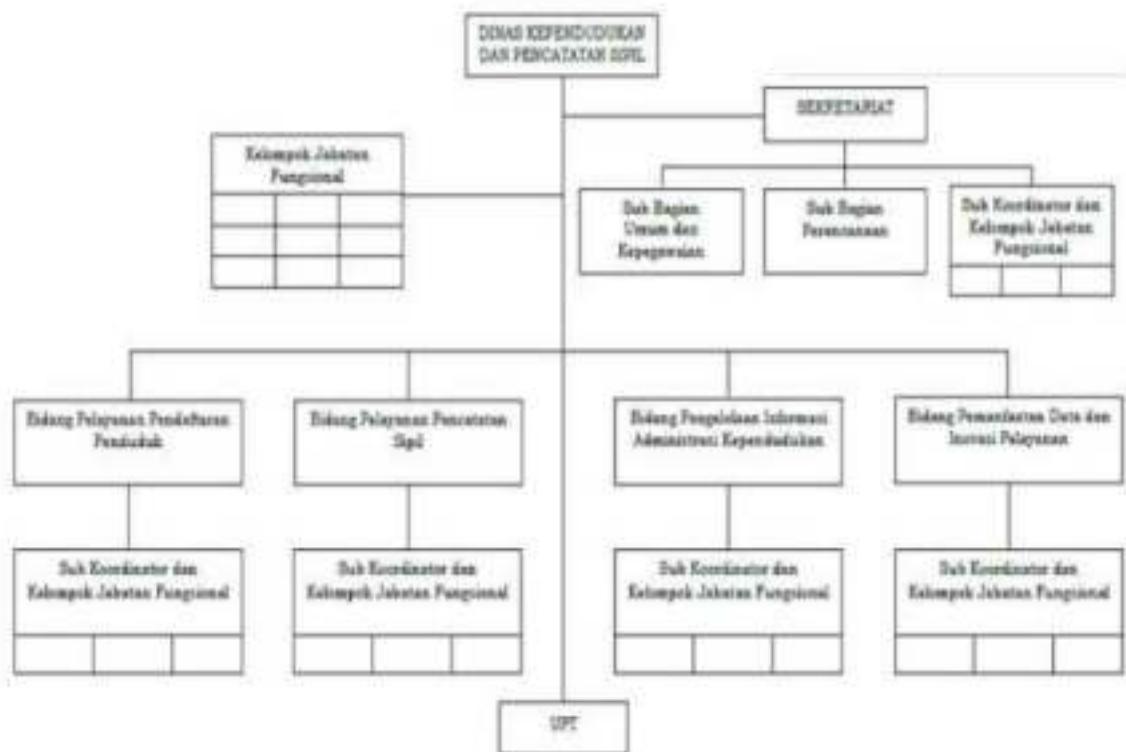
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019;
- 9) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang :

Gambar 1.2
Bagan Organisasi Perangkat Daerah



2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yaitu :

- a. Persentase Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukcapil

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

- Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana strategis perangkat daerah jangka pendek (1 tahun).
- Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah jangka waktu 1 tahun.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan perangkat daerah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah dan Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, ketentuan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pokok bahasan ini disusun sebagai hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang didalamnya dijelaskan mengenai tingkat kinerja Perangkat Daerah, hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepada daerah, capaian program nasional serta berbagai

peluang dan tantangan yang dihadapi, juga isu-isu penting/strategis dalam pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja 2023 serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021-2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2022)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2023	
						Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Cepaihan Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/5)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	
2.12..01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor									
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Dinas	Dokumen	7	7	7	2	30	7	7	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlulusnya Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	7	7	7	2	30	7	7	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Honorarium Pengelola Laporan Keuangan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	

2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kepegawai ASN	Staf	50	50	50	50	100	50	50	50
2.12.01.2.05.01	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Paketan Dinas	Staf	50	50	50	-	-	50	50	50
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	384	384	384	140	40	384	384	384
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Orang	48	48	48	-	-	48	48	48
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Berfungonya Penerangan/Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	26	26	26	-	-	26	26	26
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terleksananya Kantor yang Bersih	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan Koran/Media Cetak	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.06.09	Penyalenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas ASN	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan dan Pemeliharaan	Jenis	68	68	68	11	20	68	68	68

		Kendaraan Dinas Operasional									
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	1	1	1	-	-	1	1	1
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebelleur	Jumlah Pengadaan Mebelleur	Unit	50	50	50	11	25	50	50	50
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	17	17	17	-	-	17	17	17
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Jasa Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pelayanan pada Masyarakat dengan Baik	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya keberzihuan dan Keindahan pada Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	Jenis	10	10	10	8	80	10	10	10
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bayar Pemeliharaan, Pajak, dan Pembayaran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercedarnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Surat Kendaraan Dinas	Unit	6	6	6	5	80	6	6	6
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	Lokasi	4	4	4	1	25	4	4	4
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Kependudukan									
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12

2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	12
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Desa	10	10	10	2	20	10	10	10
2.12.02.2.03.04	Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah Desa Dinaik	Desa	10	10	10	2	40	10	10	10
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil									
2.12.03.2.-07	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penataan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil					-	-	-	50	50
2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemanitanan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Pasang Nikah Peserta Sidang Ijab					-	-	-	50	50
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	95	95	95	-	-	95	95	95
2.12.04.2.03.10	Komunikasi, informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Publik	Orang	75	75	75	-	-	75	75	75

2.12.04.2.03.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD	20	20	20	5	25	20	20	20
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Peningkatan Profil Data Kependudukan									
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Meningkatnya Penataan Profil Data Kependudukan	Buku	100	100	100	85	85	100	100	100
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Buku	100	100	100	85	85	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; Penyelenggaraan pendaftaran penduduk; dan Penyusunan profil kependudukan. Tidak terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan beberapa faktor diantaranya adanya keterlambatan kegiatan pengadaan dengan pihak penyedia, kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan kegiatan tidak dapat terlaksana karena keterlambatan data pusat.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Administrasi keuangan perangkat daerah; Administrasi umum perangkat daerah; Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan Pelayanan pendaftaran penduduk.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang dapat digambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan untuk Standar Pelayanan (SP) urusan pemerintah pada jenis pelayanan administrasi kependudukan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Layanan legalisir;
2. Layanan perpindahan penduduk dalam satu desa, antar desa dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi;
3. Layanan Kartu Keluarga,
4. Layanan KTP-el
5. Layanan Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT;
6. Layanan Kartu Identitas Anak (KIA);
7. Layanan Pendaftaran pindah datang orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
8. Layanan Pendaftaran pindah datang antar negara;
9. Layanan Akta kelahiran;
10. Layanan Akta perkawinan;
11. Layanan Akta Kematian;
12. Layanan Akta Perceraian;
13. Layanan Pengesahan anak;
14. Layanan Keterangan single/belum menikah;
15. Layanan Pengangkatan anak;
16. Layanan Akta pengakuan anak;
17. Layanan Pencatatan perubahan nama;
18. Layanan Perubahan Status Kewarganegaraan;
19. Layanan Pencatatan pembatalan perkawinan;

20. Layanan Pencatatan pembatalan perceraian;
21. Layanan Pencatatan lahir mati;
22. Layanan Pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil;
23. Layanan Akta kutipan II;
24. Layanan Konsolidasi data;
25. Layanan Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Persentase Tertib Administrasi Kependudukan			71%	78%	83%	90%	96%				
	Meningkatnya Terib Administrasi Kependudukan	Persentase Administrasi Kependudukan tertib	71%	78%	83%	90%	96%	100%	101%		
Indeks Kepuasan Masyarakat			81 Poin	83 Poin	85 Poin	87 Poin	90 Poin				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. LHE-AKIP	81 Poin 65 Poin	83 Poin 67 Poin	85 Poin 69 Poin	87 Poin 71 Poin	90 Poin 73 Poin	83 Poin 70 Poin	83 Poin 77 Poin		

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen kependudukan
2. Jumlah tenaga SDM masih kurang cukup untuk melayani di tingkat kecamatan dan dinas
3. Masih kurangnya kemampuan ASN Disdukcapil tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga menimbulkan kesulitan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang mempengaruhi terhadap pelayanan publik
4. Aplikasi layanan online Salak Deli yang merupakan layanan aplikasi penerbitan dokumen kependudukan
5. Peremajaan sarana dan prasarana di Disdukcapil dan kecamatan dalam hal pelayanan masyarakat seperti alat perekaman KTP-el, biometrik, cetak KTP dan KIA.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan. Adapun faktor kekuatan organisasi, antara lain:

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Adanya Pakta Integritas Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu;
- 5) Adanya Standar Operasional Pelayanan dalam hal memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Sedangkan faktor kelemahan organisasi diantaranya :

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

Adanya penerapan nyata Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.

Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut. Namun terdapat tantangan organisasi dalam melaksanakan program tersebut, misalnya :

- 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan
- 3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, berbayar dan berbelit-belit.

D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD yaitu proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil reviu yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa ada perubahan nama kegiatan, indikator kegiatan dan perubahan anggaran (kenaikan/penurunan pagu indikatif). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.		13.880.200.580	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	100	13.859.943.000				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.458.580	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.458.580				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lubuk Pakam	Jumlah Laporan Dokumen DPA-SKPD	12 Bulan	21.458.580	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lubuk Pakam	Jumlah Laporan Dokumen DPA-SKPD	12 Bulan	21.458.580				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.937.874.584	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.051.471.405				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lubuk Pakam	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tambahan Penghasilan	12 Bulan	8.771.997.082	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lubuk Pakam	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tambahan Penghasilan	12 Bulan	8.885.594.402				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lubuk Pakam	Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12 Bulan	165.877.604	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lubuk Pakam	Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12 Bulan	165.877.004				

	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah				86.252.800	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah				86.252.800		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Deli Serdang	Jumlah Peserta Bimtek	84 Orang	86.252.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kab. Deli Serdang	Jumlah Peserta Bimtek	84 Orang	86.252.800			
Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.024.458.782	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.041.714.382			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Fenerangan Bangunan Kantor	Lubuk Pakam	Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	100%	18.305.596	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Fenerangan Bangunan Kantor	Lubuk Pakam	Jumlah Komponen alat- alat Listrik dan Penerangan Kantor	100%	18.305.596			
Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	100%	1.215.873.040	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	100%	1.215.873.040			
Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Deli Serdang	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang Tersedia	100%	159.194.988	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Deli Serdang	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang Tersedia	100%	159.194.988			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	100%	124.120.890	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	100%	124.120.890			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Deli Serdang	Jumlah Barang dan Cetakan	100%	100.402.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Deli Serdang	Jumlah Barang dan Cetakan	100%	100.402.800			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Lubuk Pakam	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	4.342.272	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Lubuk Pakam	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	4.342.272			

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lubuk Pakam	Jumlah Makan dan Minum	12 Bulan	21.145.176	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lubuk Pakam	Jumlah Makan dan Minum	12 Bulan	17.210.778		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Deli Serdang	Jumlah Kunjungan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	100%	380.078.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Deli Serdang	Jumlah Kunjungan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	100%	402.274.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				139.584.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.584.700		
	Pengadaan Mobel	Kab. Deli Serdang	Jumlah Mobel yang Tersedia	100%	113.160.000	Pengadaan Mobel	Kab. Deli Serdang	Jumlah Mobel yang Tersedia	100%	53.260.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lubuk Pakam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	26.324.700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lubuk Pakam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	26.324.700		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.835.327.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.794.207.152		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lubuk Pakam	Jumlah Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Internet	100%	1.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lubuk Pakam	Jumlah Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Internet	100%	1.800.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	101.884.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	161.884.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.830.843.152	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Deli Serdang	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.830.843.152		
	Pemeliharaan Barang Milik				885.244.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				785.244.000		

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Deli Serdang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	100%	205.770.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Deli Serdang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	100%	205.770.000		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Deli Serdang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100%	579.474.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Deli Serdang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100%	579.474.000		
2 Program Pendaftaran Penduduk			Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan		2.531.293.592	Program Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan		2.504.376.272		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk					2.531.293.592	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2.323.992.596		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Kab. Deli Serdang	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	2.531.293.592	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Deli Serdang	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	2.323.992.596		
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					175.745.676	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				180.185.676		
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Perizwa Kependudukan dan Pencatatan Perizwa Perting Terkait Pendaftaran Penduduk		Kab. Deli Serdang	Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Desa	110.331.400	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Perizwa Kependudukan dan Pencatatan Perizwa Perting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Deli Serdang	Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Desa	114.771.400		

	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Deli Serdang	Tarifaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Orang	55.412.278	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Deli Serdang	Tarifaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Orang	55.412.278		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				58.192.900	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				107.567.900		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				58.192.900	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				107.567.900		
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Deli Serdang	Tarifaksananya Sosialisasi dan Kerjasama antar DPD	20 DPD	58.192.900	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Deli Serdang	Tarifaksananya Sosialisasi dan Kerjasama antar DPD	7 DPD	107.567.900		
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				44.534.357	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				44.534.357		
	Penyusunan Profil Kependudukan				44.534.357	Penyusunan Profil Kependudukan				44.534.357		
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Deli Serdang	Tarsusunnya Buku Profil Kependudukan	75 Buku	44.534.357	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Deli Serdang	Tarsusunnya Buku Profil Kependudukan	75 Buku	44.534.357		

E. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa terhadap rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 telah melakukan asistensi ke instansi terkait dengan hasil yang telah disepakati antara lain program dan kegiatan prioritas serta Indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas serta rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Adapun program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada rencana kerja Tahun 2023 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2.	Program Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
3.	Program Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Pencatatan Sipil;2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Profil Kependudukan;

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

1. Rencana kerja awal;
2. Rencana kerja awal disempurnakan;
3. Rancangan rencana kerja;
4. Rancangan akhir rencana kerja.

setelah dilakukan tahapan tersebut diatas maka dapat dibuat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Penyusunan Renja Tahun 2023 didukung dengan Aplikasi E-Planning yang terintegrasi dengan aplikasi SIPD dimana Bappeda Kabupaten Deli Serdang dapat memonitor penginputannya oleh Bidang Perencanaan Bappeda. Berikut ini tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Visi

"Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)"

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penayagunaan data dan informasi
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dan komunitas profesional
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung
4. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yaitu Meningkatkan Persentase Tertib Administrasi Kependudukan. Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan dan kegiatan mengacu pada visi dan misi yang tertuang pada RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Deli Serdang.

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2023 menjalankan 5 Program, 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.789.424.552. Adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.110.592.256,-
Program tersebut diatas didukung oleh 7 kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 995.194.100,-
Program tersebut diatas didukung oleh 3 kegiatan yaitu :
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.658.840,-
Program tersebut diatas didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.939.400,-
Program tersebut diatas didukung oleh 2 kegiatan yaitu :
- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.039.956,-
Program tersebut diatas didukung oleh 1 kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Profil Kependudukan

Adapun rencana Program dan Kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan secara detail pada tabel di bawah ini.

RENCANA KIRJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH												Formular RKA-BILANJA-SKPD	
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023													
RUMAH SAKIT DILANTIK HUTAN MELAKUAKAN PENGETAHUAN DAN KEGIATAN													
kode	laman	nomer Dokta	Lokasi	1-1	Bilangan Operasional	Bilangan Masing	T Bilangan Totalnya	Bilangan Transaksi	Jumlah	16 = (13+14+15)	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	12		GRUPO PEMERINTAHAN MULIA TAHUN 2023 BUDAYA, KONSEP DAN PELAKUKAN UNTUK										
2	12		GRUPO PEMERINTAHAN BUDAYA ADMINTISTRASI KEPERENCANAAN DAN PENGATURAN SPBL		15,752,236,430	5,887,086,700	0	0	15,752,236,430				
2	12-01		PROGRAM PEMERINTAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN RUMA		12,062,895,934	2,088,932,900	0	0	14,150,890,230				
2	12-01-01	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	196,121,400	24,000,000	0	0	220,121,400				
2	12-01-01-01	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	42,475,500	0	0	0	42,475,500				
2	12-01-01-01-01	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	8,000,000	0	0	0	8,000,000				
2	12-01-01-01-02	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	8,000,000	0	0	0	8,000,000				
2	12-01-01-01-03	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	9,200,000	0	0	0	9,200,000				
2	12-01-01-01-04	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	1,200,000	0	0	0	1,200,000				
2	12-01-01-01-05	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	76,227,000	0	0	0	76,227,000				
2	12-01-01-01-06	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	41,774,000	46,000,000	0	0	87,774,000				
2	12-01-01-01-07	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	16,940,000,794	0	0	0	16,940,000,794				
2	12-01-01-02	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	8,777,000,000	0	0	0	8,777,000,000				
2	12-01-01-03	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	130,875,000	0	0	0	130,875,000				
2	12-01-01-04	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	6,160,000	0	0	0	6,160,000				
2	12-01-01-05	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	125,473,250								
2	12-01-01-06	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	52,500,000	0	0	0	52,500,000				
2	12-01-01-07	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	18,331,500	0	0	0	18,331,500				
2	12-01-01-08	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	400,000,794	400,000,794	0	0	1,279,400,000				
2	12-01-01-09	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	8,760,000	14,910,600	0	0	23,670,600				
2	12-01-01-10	001	Rumah Sakit, Pengembangan dan Peningkatan Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi Kewaspadaan Transaksi	PENGEMBANGAN ALKI DAN RUMAH SPBL	43,380,000	52,400,000	0	0	95,780,000				

Kode	Uraian	Nomor	Lokasi	1.1	Jumlah					1.4
					Bilangan	Rakitan	Rakitan	Rakitan	Rakitan	
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10 + 11 + 12 + 13)	15
2 12 01 2.00 00	Pengeluaran Pendidikan Ruang Tamasya DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN RUGU TAMASYA DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			111.213.000	104.321.079	0	0	195.534.079	
2 12 01 2.00 00	Pengeluaran Bahan Logistik Kantor DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Bahan Logistik Kantor DILAKUKAN SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			192.000.000	0	0	0	192.000.000	
2 12 01 2.00 00	Pengeluaran Bantuan Cukai dan Pengetahuan Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Bantuan Cukai dan Pengetahuan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			11.086.000	14.000.000	0	0	25.086.000	
2 12 01 2.00 00	Pengeluaran Bantuan Rasionalisasi Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Bantuan Rasionalisasi Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			8.100.000	0	0	0	8.100.000	
2 12 01 2.00 00	Pengeluaran Bantuan Rasionalisasi Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Bantuan Rasionalisasi Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			17.000.000	0	0	0	17.000.000	
2 12 01 2.00 00	Pengeluaran Bantuan Rasionalisasi Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Bantuan Rasionalisasi Pengeluaran DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			186.075.200	0	0	0	186.075.200	
2 12 01 2.07	Pengeluaran Biaya RKA Stokar Pengeluaran Dilakukan Pemerintah Daerah				6.224.000	747.000.104	0	0	753.224.104	
2 12 01 2.07 00	Pengeluaran Biaya Dilakukan Pemerintah Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Dilakukan Pemerintah Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			0	14.300.000	0	0	14.300.000	
2 12 01 2.07 00	Pengeluaran Biaya Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			0	104.774.904	0	0	104.774.904	
2 12 01 2.07 00	Pengeluaran Biaya Dilakukan Dilakukan Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Dilakukan Dilakukan Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			6.224.000	10.115.000	0	0	17.339.000	
2 12 01 2.07	Pengeluaran Biaya Pengeluaran Dilakukan Pemerintah Daerah				1.898.016.852	548.800.240	0	0	2.446.817.092	
2 12 01 2.08 00	Pengeluaran Biaya Kerawang, Samarinda, Samarinda Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Kerawang, Samarinda, Samarinda DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			102.000.000	0	0	0	102.000.000	
2 12 01 2.08 00	Pengeluaran Biaya Pengeluaran Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Pengeluaran Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			102.000.000	106.800.000	0	0	208.800.000	
2 12 01 2.08 00	Pengeluaran Biaya Pengeluaran Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Pengeluaran Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			102.000.000	110.800.750	0	0	212.800.750	
2 12 01 2.08	Pengeluaran Biaya RKA Stokar Pengeluaran Dilakukan Pemerintah Daerah				221.719.000	214.000.000	0	0	435.719.000	
2 12 01 2.09 00	Pengeluaran Biaya Pengeluaran Dilakukan Dilakukan Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Pengeluaran Dilakukan Dilakukan Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			205.790.000	0	0	0	205.790.000	
2 12 01 2.09 00	Pengeluaran Biaya Dilakukan Dilakukan Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGELUARAN Biaya Dilakukan Dilakukan Dilakukan DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			186.075.000	214.000.000	0	0	380.075.000	
2 12 01 2.09	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				000.000.000	0.000.000	0	0	000.000.000	
2 12 02 2.01	Pelajaran Pendidikan Produk				291.362.000	0	0	0	291.362.000	
2 12 02 2.01 00	Pengembangan Pendidikan Produk DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGEMBANGAN Pendidikan Produk DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			291.362.000	0	0	0	291.362.000	
2 12 02 2.01	Pengembangan Produk				124.294.000	0.000.000	0	0	124.294.000	
2 12 02 2.01	Pengembangan Produk DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU	PENGEMBANGAN Produk DILAKUKAN KEPADA SISWA DAN PENGETAHUAN SPPU			86.000.000	0.000.000	0	0	86.000.000	

Kode	Uraian	Nomor Dinas	Lokasi	T+1	Jumlah					T+1
					Balansi Awal	Balansi Akhir	Balansi Total Tambah	Balansi Total Penambahan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.216.07	Kurangjaga, Infrastruktur dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil				26.211.000	0	0	0	26.211.000	
2.12.02.216.08	Pembentukan dan Pengembangan Perangkat Daerah Pembentukan Perangkat Daerah	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.03.216.09	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah Perbaikan Perangkat Daerah	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.01	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.02	Pembentukan Perangkat Daerah	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.03	Perbaikan Perangkat Daerah Perbaikan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.04	Perbaikan Perangkat Daerah Perbaikan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.05	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI KEPERLUANAN	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.06	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.07	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI KEPERLUANAN	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.08	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.04.216.09	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.01	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH KAPERASILAHAN	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.02	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.03	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH KAPERASILAHAN	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.04	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.05	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH KAPERASILAHAN	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.06	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.07	PERBAIKAN PERANGKAT DAERAH KAPERASILAHAN	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.08	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	
2.12.05.216.09	Perbaikan dan Pengembangan Perangkat Daerah dan Kesehatan Umum Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Sipil	216.211.000			216.211.000	0	0	0	216.211.000	

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Lubuk Pakam, Januari 2023

